

**PEMBEREDELAN MAJALAH TEMPO TAHUN 1994
SEBAGAI AWAL KEBANGKITAN PERS DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**ANDRE PRASETYO NUGROHO
NPM 1853033009**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PEMBEREDELAN MAJALAH TEMPO TAHUN 1994 SEBAGAI AWAL KEBANGKITAN PERS DI INDONESIA

Oleh

ANDRE PRASETYO NUGROHO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pemberedelan Majalah Tempo pada tahun 1994 dan hubungan pemberedelan tersebut pada kebangkitan pers nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian historis (sejarah).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik kepustakaan, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ada pemberedelan pada 21 Juni 1994 oleh Orde Baru kepada ketiga media, yakni Editor, Detik, dan Tempo. Pemberedelan itu merupakan bentuk kegusaran Orde Baru atas kritik yang dikeluarkan oleh Tempo melalui Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994.

Selain itu, peristiwa tersebut juga menjadi momentum forum organisasi jurnalis daerah untuk membentuk organisasi wartawan skala nasional. Akhirnya, pada tahun 1994 pun terbentuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai antithesis PWI yang hanya diam saja ketika ketiga majalah tersebut nasibnya diambang kematian. Saat di ambang kematian, media-media baru hadir pasca pemberedelan Majalah Tempo.

Kata kunci: Pemberedelan, Majalah Tempo, Orde Baru.

ABSTRACT**THE BANNING OF TEMPO MAGAZINE IN 1994
AS RESURRECTION OF THE PRESS IN INDONESIA****By****ANDRE PRASETYO NUGROHO**

This study aims to determine the background of the banning of Tempo Magazine in 1994 and the relationship between the banning and the rise of the national press. The method used in this research is historical research method (history).

Data collection techniques used in this study, namely library techniques, documentation techniques, and interview techniques. The data analysis technique used is historical data analysis techniques. The results of the research show that there was indeed a ban on June 21, 1994 by the New Order to the three media, namely Editor, Detik, and Tempo. The banning was a form of the New Order's anger at the criticism issued by Tempo through the June 11, 1994 edition of Tempo Magazine.

Apart from that, this event also became the momentum for a regional journalist organization forum to form a national scale journalist organization. Finally, in 1994 the Alliance of Independent Journalists (AJI) was formed as the antithesis of PWI, which remained silent when the fate of the three magazines was on the verge of death. In the verge of death, new media comes when Tempo Magazine was ban.

Keywords: Banning, Tempo Magazine, New Order.

**PEMBEREDELAN MAJALAH TEMPO TAHUN 1994
SEBAGAI AWAL KEBANGKITAN PERS DI INDONESIA**

Oleh

**ANDRE PRASETYO NUGROHO
NPM 1853033009**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PEMBEREDELAN MAJALAH TEMPO
TAHUN 1994 SEBAGAI AWAL
KEBANGKITAN PERS DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **ANDRE PRASETYO NUGROHO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1853033009**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syaiful M., M.Si
NIP 1961070319850311004

Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.
NIP 199301292019031010

MENGETAHUI

Ketua Jurusan,
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108200511003

Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.
NIP 197009132008122002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Syaiful M., M.Si.

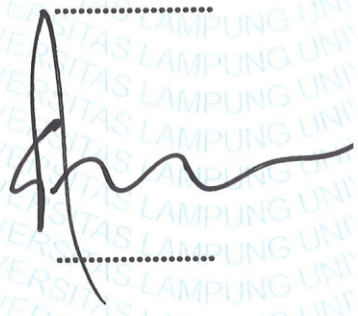


Sekretaris : Rindaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.



Penguji

Bukan Pembimbing : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP-1965123091111001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andre Prasetyo Nugroho
NPM :1853033009
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung
Alamat : Desa Lumpang, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 12 Juli 2023



Andre Prasetyo Nugroho
NPM 1853033009

RIWAYAT HIDUP



Andre Prasetyo Nugroho dilahirkan di Bogor, 04 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Warsono, S.T dan Almarhumah Ibu Samsuryani. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Perumnas Parung Panjang pada tahun 2006 dan selesai tahun 2012, kemudian melanjutkan ke Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Parung Panjang dan selesai pada tahun 2015, lalu dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 28 Kabupaten Tangerang dan diselesaikan pada tahun 2018.

Pada 2018 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, di Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada Semester V penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba , Kabupaten Way Kanan dan menjalani program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMPN 1 Bandar Sari. Selama menjadi mahasiswa, penulis hanya pernah aktif dalam Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra, dengan jabatan terakhir yang diemban adalah Pemimpin Umum (2021).

MOTO

“Tetap Berpikir Merdeka!”

UKPM Teknokra

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran.”

Pramoedya Ananta Toer

“Hidup begitu indah dan hanya itu yang kita punya.”

Dea Anugrah

“In the end, everything is a gag.”

Charlie Chaplin

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis persembahkan sebuah karya istimewa ini sebagai tanda cinta dan sayang teruntuk :

Kedua orang tuaku Bapak Warsono dan almarhumah Ibu Samsuryani yang telah membesarkankudengan penuh kasih sayang dan kesabaran, selalu memberikan motivasi, serta senantiasa mendoakanku agar tercapai segala cita-citaku. Teruntuk Bapak dan Ibu terima kasih karena selalu memberikan semangat selama menjalankan studi.

Almamater Tercinta

“Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga dapat merasakan syafaat-Nya di Yaumul Akhir kelak. Penulisan skripsi yang berjudul *Pemberedelan Majalah Tempo Tahun 1994 sebagai Awal Kebangkitan Pers di Indonesia* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., Wakil Dekan Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

5. Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terima kasih Ibu atas segala saran, dukungan, serta kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Syaiful M., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, kritik, masukan, dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala masukan dan kritik mulai dari tata bahasa penulisan, format penulisan, dan sarannya selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. yang juga sebagai pembahas penulis. Terima kasih Bapak atas segala masukan, saran, hingga kritik yang diberikan untuk kebaikan penulis dalam meneliti skripsi.
10. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Sejarah. Terima kasih atas ilmu, bantuan dalam bentuk apapun, dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
11. Teman terbaik saya Muh. Rizkillah yang selalu membantu dan selalu

ada yang terpenting. Terima kasih selalu ada saat susah maupun senang sejak masih maba polos. Tetap berpikir merdeka kawan!

12. Untuk teman perempuan terbaik Annisa Diah Pertiwi, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unila ini jasanya besar sekali. Entahlah, tanpa Nisa mungkin saya hanyalah manusia yang kehilangan arah saat mengerjakan skripsi. Sehat selalu Nis.
13. Untuk kanda, yunda, dan adik-adik UKPM Teknokra. Sebagai rumah kedua saya, sebagai tempat saya bernaung, tempat tidur, makan, belajar, dan Teknokra bertanggung jawab atas pemikiran saya hari ini. Terima kasih Teknokra, tidak ada yang bisa sebanding membalas kebaikan kalian. Aku cinta Teknokra selalu dan selamanya. Tetap Berpikir Merdeka sejak 1977.
14. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2018, terima kasih atas dukungan, semua kenangan indah, dan kebersamaannya.
15. Untuk para pelaku sejarah Mas Andreas Harsono, Mas Goenawan Mohamad, Mbak Lenah Susianty, dan Bapak Wina terima kasih sudah mau bertutur kisah sejarah Tempo pada tahun 1994.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, Juli 2023

Andre Prasetyo Nugroho

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SAMPUL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xivii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Kerangka Pikir	10
1.6. Paradigma	11
II. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Konsep	12

2.1.1. Konsep Pemberedelan Pers	12
2.1.2. Konsep Pemberedelan Majalah Tempo	14
2.1.3. Konsep Pers	16
2.1.4. Konsep Kebangkitan Pers	17
2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan	19
III. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	21
3.2. Metode Penelitian	21
3.2.1 Metode yang Digunakan	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.3.1. Teknik Dokumentasi.....	26
3.3.2. Teknik Kepustakaan.....	27
3.3.3. Teknik Wawancara	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1. Gambaran Umum Pers Orde Baru	31
4.1.2. Latar Belakang Pemberedelan Majalah Tempo di Tahun 1994....	35
4.1.2.1. Majalah Tempo Langgar Janji Pasca Pemberedelan 1982.....	35
4.1.2.2. Pemberedelan 1994 Akibat Pemberitaan Kapal Perang Bekas.....	40
4.1.3. Kebangkitan Pers di Indonesia.....	48
4.1.3.1. Terbentuknya Organisasi Profesi Selain PWI.....	48
4.1.3.2. Lahirnya Surat Kabar Baru Pasca Pemberedelan.....	58
4.2. Pembahasan.....	60
4.2.1. Munculnya Organisasi Pers AJI.....	61
4.2.2. Kemunculan Surat Kabar Baru	66
V. KESIMPULAN.....	69

5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Narasumber Penelitian.....	30
2. Daftar Nama Ikut Menandatangani Deklarasi Sirnangalih	52
3. Daftar Media yang Lahir Pasca Pemberedelan Majalah Tempo	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Pusnas	77
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di ANRI.....	80
Lampiran 3. Bukti penelitian peneliti ke Perpustakaan dan ANRI.....	79
Lampiran 4. Wawancara dengan Wina Armada Sukardi pelaku sejarah via telepon <i>whatsapp</i>	80
Lampiran 5. Foto dengan pelaku sejarah Andreas Harsono (Anggota Aliansi Jurnalis Independen/AJI dan jurnalis senior).....	81
Lampiran 6. Wawancara dengan pelaku sejarah Goenawan Mohamad Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo	82
Lampiran 7. Wawancara dengan pelaku sejarah Lenah Susianty (Anggota AJI dan jurnalis senior).....	83
Lampiran 8. Isi laporan Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994 Habibie dan Kapal Itu	84
Lampiran 9. SK Pencabutan SIUPP Majalah Tempo	85
Lampiran 10. Pemimpin Redaksi Tempo Fikri Jufri, memperhatikan siaran TV sebelum jumpa pers mengomentari pembatalan SIUPP Majalah Tempo oleh pemerintah.....	87
Lampiran 11. Majalah Tempo Edisi 11 Juni 1994 sebagai awal mula pemberedelan beserta Box Redaksi Majalah Tempo	88
Lampiran 12. Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan Tempo pada Juni 1996.	89
Lampiran 13. Rumah petak Andreas Harsono yang digunakan rapat oleh para anggota AJI. Foto diambil pada 4 April 2022.....	90

Lampiran 14. Penandatng Deklarasi Sirnagalih di dekat kolam renang di Wisma
Tempo Sirnagalih, Puncak, Bogor. 91

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, pemerintah berusaha menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Usaha-usaha tersebut didasarkan pada tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurut Soeharto, berdirinya Orde Baru tidak ada alasan lain kecuali untuk membangun kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Semuanya harus kembali berlandaskan pada penerapan Pancasila dan UUD 1945 dengan semurni-murninya (Hadi, 2012).

Pada masa Orde Baru kehidupan pers awal mulanya dirasa sangat memberi angin segar kepada perusahaan-perusahaan penerbit surat kabar yang selama masa Orde Lama banyak mendapatkan tekanan dari penguasa masa Orde Lama masa itu. Pengaturan terhadap pers pada masa itu dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara yang terkesan manis dan idealistis. Hal itu tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Pada Bab II tentang Fungsi dan Kewajiban Pers, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu kondisi tersebut mengalami perubahan, di mana pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintah mengeluarkan beberapa pengaturan terhadap

pers yang terbit di Indonesia pada masa itu dengan berbagai peraturan yang semakin mempersulit kehidupan pers dibandingkan dengan kondisi pers pada masa Orde Lama. Pengaturan tersebut seperti dikeluarkannya jargon pers Pancasila, konsep pers atau jurnalisme pembangunan, kemitraan pers pemerintah masyarakat, dan lain-lain. Regulasi pada bidang penerbitan pers, berupa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), wadah tunggal organisasi wartawan, kewajiban radio-radio dan televisi swasta untuk merelai berita-berita dari RRI dan TVRI, serta larangan untuk memproduksi berita sendiri merupakan bentuk-bentuk kontrol dan represi yang sungguh-sungguh dahsyat (Zulianto, 2016).

Pemerintah Orde Baru memandang dan memperlakukan pers non atau komunis sebagai *Partner of Power*-nya untuk “mengganyang” PKI dan simpatisan-simpatisan, serta sebagai alat konsolidasi kekuasaan Presiden Soekarno. Pers menjadi alat konsolidasi untuk membangun pemerintahan Orde Baru secara penuh, setelah runtuhnya rezim Orde Lama. Pada masa itu, pemerintahan Orde Baru berdiri secara kokoh, kemudian sikap pemerintah terhadap pers mulai berubah secara perlahan. Hal itu karena sikap kritis pers semakin tumbuh dan pemerintah merasa pemberitaan surat kabar mulai dapat mengancam keamanan dan kestabilan politik (Haritajaya, 2017).

Pers dibungkam dengan cara menerapkan politik peringatan dan sensor. Orde Baru selalu berupaya mengendalikan isu-isu politik penting maupun berita-berita sekitar tindakannya yang represif terhadap warga masyarakat. Surat peringatan dapat segera dilayangkan kepada penerbit pers yang bersangkutan jika diselidiki memuat foto, berita, dan pernyataan keras dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan kebebasan. Cara berikutnya adalah penerapan sensor jika

muncul peristiwa politik yang dinilai peka oleh aparat Orde Baru. Aparat bisa saja mendatangi penerbit tersebut, tapi juga bisa memanggil pimpinan redaksi, bahkan menerapkan “budaya telepon”. Semua ini dimaksudkan agar pers dapat dikendalikan sepenuhnya (Murtiningsih, 1999).

Di samping kontroversi yang terjadi pada Tempo, sebagai media nasional, Tempo telah banyak berkontribusi dengan melahirkan produk-produk jurnalistik. Berbagai produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh PT Tempo Inti Media Tbk antara lain: Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo English, Tempo.co, AHA Aku Tahu, Majalah Travelounge, dan Komunika. Dalam strategi pemasaran, target konsumen Majalah Tempo, yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 20–50 tahun. Harga yang sama untuk konsumen yang ditetapkan di seluruh agen wilayah distribusi, yaitu Rp40.000. Dalam saluran distribusi melalui agen langganan, agen eceran, dan langsung ke pembaca akhir. Bentuk-bentuk promosi Majalah Tempo, yaitu periklanan melalui group tempo dan branding logo pada agen. Penjualan personal yang dilakukan oleh para wiraniaga, mengadakan kegiatan kehumasan dengan membangun hubungan baik dengan publik, membangun "citra positif" yang baik dengan menyingkirkan cerita negatif (gosip), melakukan promosi penjualan untuk para agen, serta melaksanakan kegiatan pemasaran langsung dengan menggunakan tenaga telemarketing (Suparni, 2020).

Majalah Tempo juga mengusung misi untuk menyumbangkan kepada masyarakat suatu produk multimedia yang menampung dan menyalurkan secara adil mengenai suara-suara yang berbeda, menghasilkan produk multimedia yang mandiri, bebas dari tekanan kekuasaan modal maupun politik, serta menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik. Perjalanan

karier Majalah Tempo dalam mewujudkan visi dan misinya tersebut sangat tidak mudah. Majalah Tempo yang lahir pada masa Orde Baru (1971) mengalami masa-masa sulit. Hal tersebut dapat dilihat dari kejadian pemberedelan oleh pemerintah Orde Baru yang terjadi pada tahun 1982 dan 1994. Pada tanggal 12 April 1982, SIT (Surat Izin Terbit) Majalah Tempo dicabut, setelah majalah tersebut memasang foto dan memuat berita mengenai huru-hara saat kampanye pemilu tahun 1982 di Lapangan Banteng, Jakarta. Atas termuatnya berita tersebut, keluarlah SK Menpen RI (Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia) Nomor 76/KEP/MENPEN/1982. Tapi akhirnya Tempo diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam “janji” di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu (zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang fungsinya untuk mengontrol pers) yang menyatakan bahwa Majalah Tempo dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional. Setelah itu Tempo dapat kembali terbit meski dihantui awan gelap pencabutan SIUPP suatu saat kembali (Agustina, 2015).

Orde Baru menjalankan *status quo*-nya di luar sisi dalam konstelasi politik nasional pada aspek pers Indonesia juga telah berlangsung dinamika politik yang cukup menarik. Tepatnya pada 21 Juni 1994, Majalah Tempo ditutup secara paksa oleh pemerintah. Keputusan pembatalan SIUPP Tempo ditetapkan oleh Menteri Penerangan Harmoko dengan Surat Keputusan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994. Pemberedelan Tempo dilakukan dengan alasan keamanan yang menyangkut substansi berita. Hal ini dilakukan karena Tempo dianggap telah mengganggu stabilitas nasional dan tidak menyelenggarakan kehidupan Pers Pancasila yang

sehat dan bertanggung jawab melalui pemberitaannya tentang pembelian kapal perang eks Jerman Timur, terutama soal penyediaan dananya (Legowo, 2013).

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tempo tercantum dalam peraturan yang termuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang penerangan dan pers bagian (d). Dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas, dan bertanggung jawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini maka perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat (Haritajaya, 2017).

Pada 21 Juni 1994, tepat 27 tahun yang lalu, pemerintahan Presiden Soeharto membredel Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik. Namun, alih-alih menjadi titik nadir sejarah pers Indonesia, momentum itu malah menjadi tonggak awal perlawanan memperjuangkan kebebasan pers. Dilansir dari Tempo.co, untuk pertama kalinya wartawan melawan rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Tempo menolak keputusan pemberedelan dengan menggugat pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketika itu, tanpa diduga hakim Benyamin Mangkoedilaga memenangkan Tempo.

Tentu saja, apapun alasan yang mendasari pemerintah melakukan pembatalan SIUPP Tempo, membuktikan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang hak jawab bagi pers dan tak ada pencairan kembali SIUPP. Artinya, vonis mati bagi kebebasan pers. Bagi Tempo, pemberedelan itu bukan hanya sekedar soal nasib

450 karyawan yang bernaung di bawah Tempo. Lebih dari itu, hal ini berakibat pada terputusnya hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya di bidang informasi dan proses pendidikan politik bangsa (Wirodono, 1995: 74).

Tertutupnya ruang gerak pers, melahirkan perlawanan-perlawanan komunitas pers Indonesia. Perlawanan tersebut melahirkan organisasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) yang bergerak untuk menindak kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Adapun gerakan yang dilakukan oleh AJI didasari oleh pemberedelan beberapa media, seperti Detik, Editor, dan Tempo pada 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota. Setelah itu, gerakan perlawanan terus berkembang. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri atas jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor pada 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini, yaitu menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI (Aji.or.id).

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini berlangsung di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis. Selain demonstrasi dan mengecam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen

(FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC), dan Solidaritas Jurnalis Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen yang kemudian menjadi Suara Independen (Margianto, 2006: 27-28).

Pemberedelan majalah Tempo oleh rezim Orde Baru pada tahun 1994 memiliki dimensi politik yang signifikan. Pada saat itu, Tempo dikenal sebagai salah satu media yang secara kritis melaporkan dan mengungkap berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Pemberedelan tersebut dapat dipahami sebagai upaya rezim Orde Baru untuk menekan kebebasan pers dan menghentikan pemberitaan yang dianggap mengancam stabilitas politik dan kekuasaan mereka. Pemberedelan Tempo juga dapat dipahami sebagai pesan politik kepada media lain dan masyarakat bahwa rezim Orde Baru tidak akan mentoleransi kritik yang terlalu tajam dan dapat mengancam kekuasaan mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa penilaian terhadap Tempo dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing pihak. Bagi mereka yang mendukung rezim Orde Baru, tindakan pemberedelan mungkin dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional. Namun, bagi mereka yang memperjuangkan kebebasan pers dan demokrasi, pemberedelan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tindakan otoriter rezim Orde Baru (Müller, 2004: 67).

Di masa reformasi tepatnya Presiden B. J. Habibie membuat kebebasan mengenai kebebasan pers di Indonesia, salah satunya merevisi undang-undang pers di masa Orde Baru diganti dengan undang-undang baru Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di masa reformasi pers diberikan perlindungan ukum yang berkaitan dengan

media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, percetakan dan penerbitan surat kabar yang mana pemerintah diharamkan untuk menyensor atau memberedel pers di Indonesia (Pratama, 2022; 196).

50 tahun Majalah Tempo berdiri, 50 tahun itu juga Tempo tetap eksis dan terus menjadi kontrol sosial bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi bernegara. Ungkapan "enak dibaca dan perlu" dalam setiap rilisan per minggu Majalah Tempo sebagai dasar bahwa Tempo secara redaksional dalam pemberitaan harus enak dibaca agar pembaca dapat memahami substansi dalam peristiwa yang ada di dalamnya. Selain itu, kata "perlu" dalam ungkapan tersebut berarti masyarakat Indonesia perlu membaca informasi terkini sebagai bentuk sumbangsih Tempo dalam penguatan karakter pendidikan politik bangsa menuju negara yang lebih demokratis. 50 tahun itu juga Tempo mengalami jegalannya dari pemerintah yang harusnya memberi ruang bagi pers untuk tetap bersuara sebagai bentuk negara demokrasi. Pada tahun 1994 negara hanya memberi vonis mati bagi Tempo agar suaranya makin senyap dan lama-lama hilang akibat dibungkam, pada tahun 1994 itu pula pergolakan para jurnalis di Indonesiaa sepakat bahwa pers di Indonesia harus bangkit agar kejadian 21 Juni 1994 tidak terulang, sehingga tahun itu dikenal menjadi titik balik dari bangkitnya pers di Indonesia. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang *Pemberedelan Majalah Tempo Tahun 1994 sebagai Awal Kebangkitan Pers di Indonesia*.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi pemberedelan Majalah Tempo pada tahun 1994?
2. Bagaimanakah hubungan pemberedelan Majalah Tempo pada kebangkitan pers nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Maka yang menjadi masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberedelan Majalah Tempo pada tahun 1994?
2. Untuk mengetahui hubungan pemberedelan Majalah Tempo pada kebangkitan pers nasional?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu;

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengenai pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal bangkitnya pers di Indonesia

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal bangkitnya pers di Indonesia.

b. Bagi Pembaca

Memberikan pengetahuan mengenai pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal bangkitnya pers di Indonesia.

c. Bagi Lembaga Pendidikan


Penelitian ini dapat membantu lembaga pendidikan untuk tambahan referensi mengenai pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal bangkitnya pers di Indonesia.

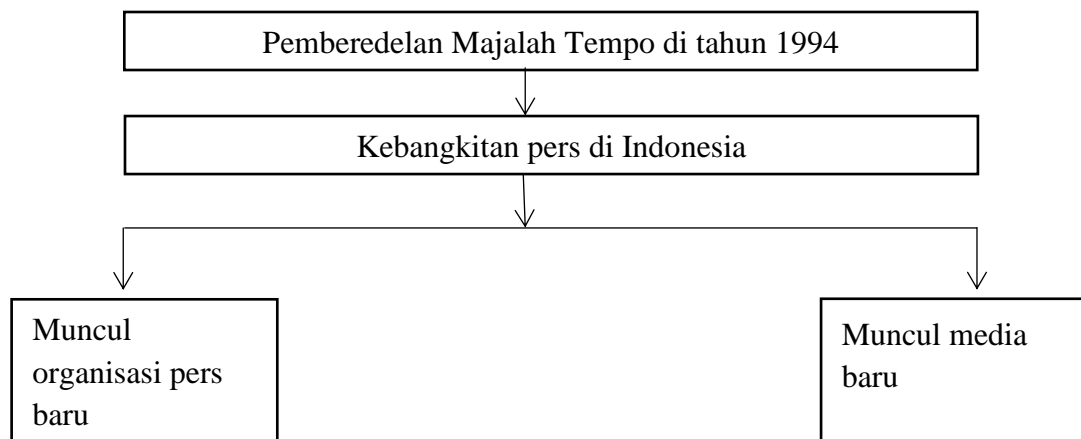
1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini akan dikembangkan oleh penulis yaitu pemberedelan Majalah Tempo pada tahun 1994 menjadi awal kebangkitan pers di Indonesia. Ketika pers Indonesia menjadi kontrol sosial dan media untuk mengawasi pemerintah. Namun pada masa Orde Baru pers mendapat tekanan dari pemerintah sendiri. Awalnya yang kita kira pers akan mendapat dukungan dari pemerintah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa di dalam Bab II tentang Fungsi dan Kewajiban Pers, dalam pasal 4, di mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Seiring dengan berjalannya waktu kondisi tersebut mengalami perubahan, di mana pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintah mengeluarkan beberapa pengaturan terhadap pers yang terbit di Indonesia pada masa itu dengan berbagai peraturan yang semakin mempersulit kehidupan pers. Namun pada pemberedelan “Majalah Tempo” tahun 1994 membuat pers di Indonesia menjadi geram terhadap pemerintah. Akhirnya jurnalis dari berbagai kalangan bersatu membentuk aliansi. Aliansi tersebut bernama Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Di mana wadah

organisasi ini dibuat untuk menentang tindakan represif dari pemerintah pada Orde Baru dan menginginkan kebebasan menyiarkan informasi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Selain lahirnya organisasi baru, media-media baru lahir sebagai ekspansi dan mendorong warna pers meski pemberedelan menghantui. Media-media yang lahir adalah media yang dibentuk setelah pemberedelan Majalah Tempo di tahun 1994.

1.6 Paradigma

Keterangan:  : Garis Keterkaitan.



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep

2.1.1 Konsep Pemberedelan Pers

Undang-Undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966 dan diperbaharui dengan UU PP No. 21 tahun 1982, penjelasan mengenai istilah pemberedelan tidak ada, setelah berakhirnya Orde Baru dan UU PP No. 21 tahun 1982 diperbaharui dengan UU PP No. 40 tahun 1999, dijelaskan dalam BAB I tentang Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (9) berbunyi: “*Pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum* “ (Haritajaya, 2017).

Breidel adalah istilah bahasa Belanda yang berarti pemberangusan, pelarangan, atau pembatasan terhadap media massa atau produk pers, yang biasanya mengacu pada barang cetakan, seperti surat kabar dan buku. Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah atau organisasi tertentu. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers pemberedelan terhadap pers di Indonesia pada mulanya merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan *Persbreidel Ordonantie* pada tanggal 7 September 1931, sebagaimana diberitakan dalam *Staatsblad* 1931 No. 394 dan *Staatsblad* 1931 No. 44. Dalam Peraturan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda,

menegaskan bahwa penguasa dapat sewaktu-waktu menindak surat kabar dan majalah yang isinya dianggap mengganggu ketertiban umum. Pencetak, Penerbit, dan Penerbit tidak akan memiliki kesempatan untuk membela atau mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Baru pada tahun 1954 peraturan-peraturan baru tersebut dihapuskan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954. Namun, penindasan terhadap pers terus berlanjut pada masa Orde Lama (1967) dan berlanjut pada novel Orde Lama (1967—1998), yang mengakibatkan penutupan banyak surat kabar dan majalah dan di bawah tekanan untuk tidak meliput suatu peristiwa atau informasi yang secara sepihak dianggap tidak pantas oleh pihak berwenang (Andriana, 2009).

Jadi, selama Orde Baru tindakan pemberedelan sering terjadi bahkan ketika larangan sensor dan pemberedelan tercantum dalam UU PP Nomor 11 Tahun 1966, Bab II tentang Fungsi, Kewajiban, dan Hak Pers, pasal 4 berbunyi: terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Selain itu, terdapat juga perturan mengenai izin terbit yang memiliki makna ganda dalam UU PP No.11 Tahun 1966, Bab IV tentang Hak Penerbitan dan Fasilitas Pers, pasal 8 ayat (1) berbunyi: setiap warga mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakikatnya Demokrasi Pancasila dan Pasal 8 ayat (2) berbunyi: untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit (SIT) (Haritajaya, 2017).

Contoh dari praktik pemberedelan yaitu pada masa Orde Baru adalah larangan terhadap buku-buku tulisan Pramoedya Ananta Toer. Sebagaimana

diketahui, Pramoedya Ananta Toer adalah seorang sastrawan yang menulis buku-buku *Bumi dan Manusia*, *Anak Semua Bangsa*, *Rumah Kaca*, dan *Jejak Langkah* yang pada dasarnya menggambarkan tentang bahaya-bahaya penjajahan ekonomi. Buku- buku karya sastrawan yang lama menetap di Pulau Buru tersebut pada waktu itu dilarang dan bahkan diperintahkan untuk dibakar oleh Jaksa Agung karena isinya dianggap menyebarkan *Marxisme/Leninisme* (Arinanto, 1991).

Istilah penutupan atau penghentian penerbitan pers dikenal dengan istilah pemberedelan. Jika diketahui pers melanggar ketentuan undang-undang, pemerintah memiliki hak konstitusional untuk menutup, melarang, mencabut, dan mencegah perizinan atau peredaran publikasi media massa. Penindasan pers pada masa Orde Baru memberikan pelajaran penting untuk menghadapi kehidupan masa depan (Imron, 2016).

Dari sumber rujukan di atas bisa dimaknai jika pemberedelan atau pelarangan dari suatu penyiaran kepada publik adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Alasan pemberedelan biasanya adalah pemberitaan di media yang bersangkutan menjurus kepada sesuatu atau banyak hal yang sangat menyinggung penguasa dan atau lapisan masyarakat tertentu.

2.1.2 Konsep Pemberedelan Majalah Tempo

Dalam perjalanannya, ada pasang surut yang dialami. Fakta-fakta yang disuguhkan Majalah Tempo lewat pemberitaanya, kerap bersinggungan dan

memunculkan rasa tak nyaman bagi penguasa Orde Baru ketika itu. Akibatnya Tempo mengalami dua kali pemberedelan. Adapun Tempo telah mengalami sejarah panjang dalam masa berdirinya. Bermula dari sebuah ruko kecil di Pecinan, Senen, Jakarta Pusat, beberapa wartawan muda, seperti Goenawan Moehamad, Fikri Jufri, Bur Rasuanto, Christianto Wibisono, Yusril Djalinus, dan Putu Wijaya membentuk sebuah majalah mingguan yang mereka namakan “Majalah Tempo” . Maka dari salah satu blok gedung di Jl. Senen Raya 83, Jakarta pada 6 Maret 1971, terbitan perdana MajalahTempo beredar di masyarakat dengan yayasan Jaya Raya sebagai penerbitnya lewat perusahaannya dengan nama PT Grafiti. Tempo mampu tumbuh dan berkembang pesat, bahkan menjadi ikon dan satu-satunya majalah berita yang independen sekaligus terpercaya di Indonesia . Majalah Tempo memiliki SIT pada tanggal 31 Desember 1970, namun baru terbit perdana pada 6 Maret 1971.

Tiga tahun setelah Tempo lahir. Semangat di kalangan pengelola redaksi kala itu sangat tinggi. Apalagi dengan rata-rata umur mereka yang masih 20-an. Saat itu mereka yakin bahwa majalahnya akan dibaca banyak orang. Meski sempat diragukan salah seorang petugas pemasaran senior, namun mereka tetap tancap gas. Segala dan upaya dikerahkan. Bagi mereka, setiap waktu merupakan hasil kerja yang terbaik. Tentu saja tak semudah yang dibayangkan. Meski ini dibidang redaksi cukup banyak penulis yang berpengalaman, bahkan sebagai sastrawan yang sudah punya nama, secara keseluruhan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) masih sangat terbatas.

Tempo merupakan majalah independen yang tidak dipengaruhi oleh pihak lain, baik itu sebagai pribadi maupun lembaga. Tempo juga merupakan forum yang memperjuangkan hak bicara bagi semua orang atau lembaga tanpa pengecualian (Kartiko, 2014).

Majalah Tempo pasca diberedel tahun 1994 dapat terbit kembali setelah Reformasi 1998, tepatnya 6 Oktober 1998. Tempo pun dinilai sebagai lambang kebebasan berekspresi dengan menerapkan prinsip enak dibaca dan perlu. Selain itu Tempo sebagai institusi yang telah membentuk dan mendefinisikan wajah Indonesia melalui tulisan politik dan kebudayaan yang ada di Indonesia (Steele, 2014: 256-257).

2.1.3 Konsep Pers

Pers merupakan cara penyampaian informasi yang dinilai penting bagi masyarakat, dulu pers merupakan orang yang harus selalu tahu lebih dulu tentang fakta atau peristiwa yang bernilai penting atau menarik bagi masyarakat. Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis (Yudhapramesti, 2015).

Pers adalah pembentuk opini publik dalam praktik bernegara. Pers memiliki daya jangkau yang luas dalam menyebarkan informasi, bahkan melewati batas wilayah, kelompok, umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Pers dapat mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing dan memiliki kebijakan redaksional ihwal peristiwa tertentu.

Kebijakan redaksional itu memberi dampak bagi opini di lingkungan masyarakat (Rinaldo, dkk., 2022).

Sebaliknya, pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media massa communications yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis mau pun dengan kata-kata lisan. Ditegaskan oleh *Commission on The Freedom of The Press*, bahwa: *“If will be understood that we ae using the term “press” to include all means of communicating to the public newspapers, ma- gazines, or books, by radio broadcast, by television, or by films”* (Saptohadhi, 2011).

Adapun pengertian pers menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

2.1.4 Konsep Kebangkitan Pers

Pemberedelan Majalah Tempo setidaknya membuat perwajahan media di Indonesia sedikit berubah. Secara historis, pers dikenal memiliki sejarah panjang sebagai institusi pemberdaya masyarakat serta alat perjuangan bangsa. Intervensi Orde Baru dan wadah tunggal organisasi membuat per tidak bebas dan diintervensi akhirnya. Pemberedelan Majalah Tempo adalah

bukti bagaimana Orde Baru mengambil alih pers, menolak pemberedelan untuk bangkit, dan melawan Orde Baru bisa dirasakan saat ini (Prayudha Aditya, 2022).

Ketika berbicara pers, berbicara juga orang yang beraktivitas dan terlibat dalam menyampaikan informasi dan memuat berita. Dalam menempatkan pers sebagai cermin masyarakat dan pers harus menjadi penentu agenda interaksi masyarakat dan jurnalisnya yang dinamis (Oetama, 2004: 48-49)

Era Reformasi saat ini, telah membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan insan pers. Euforia demokrasi dan pekik, dengan kebangkitan pers yang terbebas dari belenggu sensor, larangan, campur tangan dan intervensi dari mulai pemerintah, partai politik berkuasa, militer, dan polisi dan dijamin oleh Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, telah memungkinkan kehidupan pers nasional di Indonesia termasuk juga kehidupan pers untuk berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dinamika, dan perkembangan masyarakat di mana pers itu sendiri berada. Kebangkitan itu dirasa banyaknya media yang bermunculan pasca Orde Baru, yang membuat arus informasi semakin deras (Sutrisono, 2011).

Dampak dari bangkitnya pers pun ada sisi yang dipandang kurang baik antara lain, eksploitasi yang lebih eksplisit terhadap jurnalisme atau media massa saat ini, yang jauh dari eksplorasi dalam pemberitaan yang didasarkan pada sangat jelas dan jujur. Kebebasan pers pada masa reformasi dianggap sewenang-wenang dan sembrono untuk segera melaporkan sesuatu secara terus menerus tentang bagaimana pers saat ini sudah di luar nalar dalam

menyajikan berita, menyebarkan sensasi, dan memanfaatkan informasi untuk membidik dan bertujuan untuk meraih rating dan nilai jual yang tinggi (Padiatra, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Judul skripsi berjudul *Pemberedelan Pers di Masa Orde Baru (1966-1998)* oleh Olyvie Bintang Haritajaya (2017) yang berasal dari Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama pers mempunyai konsep yang sama “diberedel” dalam maksud penelitian terdahulu berfokus pada pemberedelan pers masa Orde Baru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga mengangkat isu yang sama yakni pemberedelan. Perbedaannya yakni dalam hal lingkup pemberedelan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya menjadi Majalah Tempo sebagai objek dan di tahun 1994 tidak dari awal Orde Baru. Sedangkan sumbangsih penelitian tersebut pada penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian secara keseluruhan, dan menjadi tolak ukur kalau pembungkaman pers melalui pemberedelan di tahun sebelum 1994 yakni masa Orde Baru.
2. Judul jurnal berjudul *Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam* oleh Aryo Subarkah Eddyon (2021) yang berasal dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie. Persamaan penelitian dari skripsi ini dengan penelitian yang mau dilakukan adalah pers sama-sama

mengalami pembungkaman pada masa Orde Baru. Perbedaan dilihat dari pers mahasiswa dan pers nasional, dua hal tersebut adalah yang berbeda, karena pers mahasiswa hanya sebagai pers alternatif, tetapi intinya sama-sama dibungkam. Kemudian sumbangsih penelitian tersebut pada penelitian yang hendak dilakukan yaitu sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian. Dari jurnal ini penulis tahu bahwa Orde Baru mengatur pers sesuai dengan kemauannya. Yakni informasi satu arah, ketika yang berbeda akan mengalami pembungkaman, hal ini pun dirasakan oleh pers mahasiswa maupun pers lokal yang mengalami intervensi yang sama tanpa memandang .bulu.

3. Judul jurnal yang berjudul *Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia* oleh Satrio Saptohadi (2011). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bagaimana kehidupann pers sebelum dan setelah Orde Baru. Penulis juga fokus kehidupan pers setelah Orde Baru. Perbedaannya adalah pembahasannya yang penulis teliti lebih mengerucut kepada pemberedelan Tempo sedangkan penelitian terdahulu hanya lebih kepada pemberedelan pers di masa Orde Baru

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dari masalah yang telah dipaparkan diatas untuk menghindari kesalahpahaman, maka dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang sasaran dan tujuan penelitian yang termuat dalam ruang lingkup penelitian yaitu :

- a) Subjek Penelitian : Pers masa Orde Baru
- b) Objek Penelitian : Majalah Tempo
- c) Tempat Penelitian : (a) Arsip Nasional Republik Indonesia
(b) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- d) Waktu Penelitian : 2022
- e) Bidang Ilmu : Sejarah

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua suku kata yaitu metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan penelitian berasal dari kata *research* “re” adalah kembali “search” mencari. Mencari kembali yang dimaksud adalah secara terus-menerus melakukan penelitian melalui proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok

penyelidikan (Darna, 2018).

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris* dan *sistematis*. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2013: 3).

3.2.1 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis karena penelitian yang diambil objek peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Tujuan dari penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, memverifikasikan, mensintesis buku-buku untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dalam penelitian historis tergantung dalam dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari sumber primer, yaitu penelitian secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Sifat penelitian historis adalah sifat yang ditentukan oleh sumber yang diperoleh, seperti data primer dan data sekunder. Adapun langkah-langkah penelitian historis dapat dikatakan

merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian dan mempermudah penulisan historis (Hakim, 2018: 17-19).

Beberapa tahapan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan topik yang dipilih. Cara yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Peneliti melacak kebenaran sumber-sumber tertulis dengan cara membandingkannya dengan sumber-sumber lain yang memiliki kesamaan mengenai peristiwa yang dituliskan dalam sumber-sumber tersebut. Peneliti juga berusaha mencari sumber-sumber yang sezaman dengan permasalahan yang akan diteliti.

Tahap heuristik ini, peneliti mencari serta mengumpulkan data-data sejarah yang berhubungan dengan “Pemberedelan Majalah Tempo Tahun 1994 Sebagai Awal Kebangkitan Pers di Indonesia” dalam berbagai literatur baik majalah, buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menghimpun data yang di peroleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS), Adapun buku-buku yang akan digunakan antara lain *Buku Putih TEMPO* ditulis oleh tim wartawan Tempo, *Pers di Masa Orde Baru* ditulis oleh David T. Hill, *Wars Within The Story of Tempo an Independent Magazine in Soehartos Indonesia* ditulis Janet Steele, dan majalah-majalah Tempo pada bulan Juni tahun 1994.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan setelah peneliti mengumpulkan berbagai sumber data dan sebelum sumber data digunakan dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Selain itu, kritik sumber berfungsi untuk memeriksa kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah yang akan dikaji. Umumnya ada dua aspek yang dikritik yaitu *otentisitas* (keaslian sumber) dan *kredibilitas* (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Keaslian sumber harus diperhatikan karena masih banyak sumber sejarah yang palsu dan tidak bisa dipertanggung jawabkan isinya. Terdapat dua jenis kritik sumber, *eksternal* dan *internal*. Kritik *eksternal* dimaksud untuk *otentisitas* (keaslian) suatu sumber. Kritik *internal* dimaksudkan untuk menguji *kredibilitas* dan *reabilitas* sumber (Daliman, 2012: 21-26).

a. Kritik eksternal

Kritik eksternal digunakan untuk menguji *otentisitas* (keaslian) suatu sumber agar diperoleh sumber yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya bahasa, penulisan, ungkapan-ungkapan, identitas pengarang. Kritik *eksternal* dilakukan peneliti untuk mengkritik sumber-sumber dari buku, koran dan dokumen yang akan dipakai.

b. Kritik Internal

Kritik internal mengacu pada kredibilitas isi sumber, seperti halnya isi dokumen yang bisa dipercaya, tidak dimanipulasi dan mengandung bias kecocokan. Kegunaan lain dari kritik internal untuk lebih memahami isi teks dan dapat menguji lebih jauh

mengenai isi dokumen. Peneliti melakukan kirtik internal dari sumber yang di dapat berupa jurnal, buku, artikel dan lain sebagainya, namun tidak semuanya digunakan peneliti, hanya sumber yang sesuai dengan topik yang peneliti gunakan. Untuk membenarkan isi sumber peneliti melihat informasi pada buku-buku yang berhubungan dengan peristiwa tersebut karena tidak ada wawancara yang dilakukan peneliti.

3. Interpretasi

Interpretasi sering diartikan sebagai penafsiran. Menafsirkan sama juga memberikan kesan pertama terhadap suatu peristiwa oleh sejarawan. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis yang harus relevan pada dokumen. Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan sedangkan sintesis berarti mengumpulkan. Proses kerja interpretasi yang melibatkan aktivitas mental seperti seleksi, analisis, konspirasi, serta kombinasi dan berujung pada sintesis. Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai penafsiran dari fakta sejarah yang diperoleh dari sumber sejarah. Tahap interpretasi ini, penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian. Penafsiran yang dimaksud adalah penulis menganalisis sumber yang telah dipilih agar dapat menguraikan hasil penelitian mengenai Pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal kebangkitan pers di Indonesia (Safitri, 2018).

4. Historiografi

Historiografi merupakan rekonstruksi masa lalu. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah

dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal sampai dengan akhir. Tahap historiografi ini, penulis menuliskan hasil informasi yang telah di susun berdasarkan metode penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Tahap ini, penulis tidak hanya menuliskan fakta atau sumber informasi mengenai hasil penelitian, akan tetapi juga menyampaikan suatu pemikiran berdasarkan sumber informasi dan fakta dari hasil penelitian. Selain itu juga, penulis berusaha menuliskan hasil informasi dan interpretasi yang telah dilakukan menjadi hasil penelitian sebagai tugas akhir yang dilakukan oleh penulis (Safitri, 2018).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya (Subagyo, 2006: 39).

3.3.1 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi diartikan sebagai suatu metode atau cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Studi dokumentasi

atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sedangkan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. (Sugiyono, 2017: 329).

3.3.2 Teknik Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Dalam mencari sumber bacaan, seorang peneliti harus selektif sebab tidak semua dapat dijadikan sebagai sumber data. Menurut Sumadi Suryabrata, setidaknya ada dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu (a) prinsip kemutakhiran (*recency*) dan (b) prinsip relevansi (*relevance*) (Harahap, 2014).

3.3.3 Teknik Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian. Selain itu juga wawancara sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2017: 372-376).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Pertanyaan yang digunakan untuk merangsang informasi dibuat sama sebagaimana membuat daftar pertanyaan dengan berbagai penyesuaian. Perbedaannya pada cara menanyakan daftar pertanyaan tersebut. Teknik wawancara menghendaki kedua belah pihak berinteraksi langsung secara aktif. Wawancara adalah situasi berhadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Selain itu wawancara sebagai sebuah proses komunikasi interpersonal dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang direncanakan agar terciptanya interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan (Rosaliza, 2015).

Sejalan dengan pendapat tersebut (Soegijono,1993) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan

motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Berdasarkan pemaparan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah interaksi verbal antara dua orang yang saling berhadapan untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan informan dan responden. adapun teknik wawancara yang dapat digunakan melalui dua cara, yaitu:

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, ketika peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yang mana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.

Berdasarkan pendapat tersebut, bentuk wawancara yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang akan dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada informan dan responden. Wawancara terstruktur dalam penelitian ini akan dilakukan kepada 4 (empat) narasumber antara lain;

Tabel 1. Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Posisi/Status	Institusi
1.	Goenawan Mohamad	Pelaku Sejarah	Majalah Tempo
2.	Andreas Harsono	Pelaku Sejarah	Aliansi Jurnalis Independen
3.	Lenah Susianty	Pelaku Sejarah	Aliansi Jurnalis Independen
4.	Wina Armada Sukardi	Pelaku Sejarah	Persatuan Wartawan Indonesia

Keempat narasumber ini merupakan responden yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal kebangkitan pers di Indonesia. Berikut profil dari narasumber;

1. Bapak Goenawan Mohamad (80 tahun) selaku Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo kala itu, tetapi Goenawan Mohamad yang mengikuti perjalanan pemberedelan sampai tahap persidangan.
2. Bapak Andreas Harsono (57 tahun) selaku anggota AJI pertama dan sebagai penandatangan Deklarasi Sirnagalih pada tahun 1994 sebagai awal terbentuknya organisasi AJI selain PWI.
3. Ibu Lenah Susianty (55 tahun) sebagai penandatangan Deklarasi Sirnagalih dan teman dari Goenawan Mohamad dan Andreas Harsono.
4. Bapak Wina Armada Sukardi (63 tahun) sebagai Ketua Departemen Hukum PWI tahun 1994.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 terhadap bangkitnya pers di Indonesia sebagai berikut;

1. Pemberedelan Majalah Tempo dilatarbelakangi oleh Majalah Tempo menerbitkan majalah yang berjudul *Habibie dan Kapal Itu*. Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika (PPG), Subrata atas nama Menteri Penerangan Harmoko mengumumkan pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Tempo, Detik, dan Editor, di Departemen Penerangan pada 21 Juni 1994. Selain itu, pemberedelan ini dikarenakan Majalah Tempo menurut pemerintah telah melanggar perjanjian pada pemberedelan sebelumnya di tahun 1982.
2. Pasca pemberedelan Majalah Tempo adanya kebangkitan pers di Indonesia yang dapat diindikasikan sebagai berikut;
 - a. Terbentuknya organisasi pers baru Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI lahir dari 58 jurnalis dan aktivis pada 7 Agustus 1994, yang saat itu kesal dengan sikap PWI yang memaklumi pemberedelan Majalah Tempo yang dilakukan Departemen Penerangan. AJI pun memiliki Tri Panji AJI, yaitu; mendorong dan melindungi kemerdekaan pers,

mewujudkan profesionalisme jurnalis, dan terakhir meningkatkan kesejahteraan jurnalis.

- b. Munculnya media-media baru berskala lokal maupun nasional pasca pemberedelan Tempo 1994, pemberedelan tersebut memicu media untuk mengembangkan bisnisnya di lokal dan nasional.

5.2 Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menyampaikan saran-saran di antaranya sebagai berikut:

3. Bagi Peneliti Lain

Perlunya penelitian yang lebih lanjut soal Majalah Tempo, sebagai salah satu media yang cukup tua di Indonesia. Majalah Tempo bisa digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya ilmiah karena berita yang disajikan selalu berdasar pada fakta dan kebenaran. Seperti pasca pemberedelan Tempo muncul gerakan bawah tanah menciptakan media independen bernama Blok M yang perlu dikaji lebih dalam dari peristiwa tersebut.

4. Bagi Pembaca

Penulis berharap pembaca dapat mengetahui dan mengerti tentang pemberedelan Majalah Tempo tahun 1994 sebagai awal bangkitnya pers di Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan pembaca mengenai bagaimana pers sangat berperan pada masa itu untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Efendi, A. (2010). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: CV. Pamularsih.
- Gandhi, M. (1985). *Undang-undang Pokok Pers Proses Pembentukan dan Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Hakim, C. L. (2018). *Politik Pintu Terbuka: Undang-Undang Agraria dan Perkebunan The di Daerah Bandung Selatan 1870-1929*. Jawa Barat: Vidya Mandiri.
- Hanazaki, Y. (1998). *Pers Terjebak*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Hill, David. T. (2011). *Pers Pada Masa Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Margianto. (2006). *Media Online: Antara Pembaca, Laba, dan Etika*. Jakarta : Dian Raya.
- Manan, Abdul. (2019). *Sebuah Alternatif dari Sirnagalih; 25 Tahun Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: AJI Indonesia.
- Maryadi, Eko. (2014). *Semangat Sirnagalih- Sejarah Aliansi Jurnalis Independen*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- McCoy, M. E. (2019). *Scandal and Democracy: Media Politics in Indonesia*. United States of America: Southeast Asia Program Publications.
- Mohamad, Goenawan. (1994). *Buku Putih Tempo: Pemberedelan Itu*. Jakarta: Alumni Majalah Tempo.

- Müller, B. (Ed.). (2004). *Censorship & Cultural Regulation in the Modern Age* (Vol. 22). Rodopi BV.
- Nazi. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Oetama, Jacob. (2004). *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pertiwi, D. K. (2021). *Mengenal Orde Baru*. Sleman: EA Books.
- Pratama, Rinaldo Adi, and Yusuf Perdana. (2022). *Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi*. Penerbit Lakeisha.
- Santoso. (1998). *Wartawan Terpasung Intervensi Negara di Tubuh PWI*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Steele, Janet. (2014). *Wars Within Teh Story of TEMPO an Independent Magazine in Soeharto's Indonesia*. Jakarta: PT Tempo Inti Media Tbk.
- Subagyo, J. (2006). *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Utami, Ayu (1994). *Bredel 1994*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen
- Wasino, H. (2018). *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Wirodono, S. (1995). *Gerakan Politik Indonesia Catatan 1994*. Jakarta: PUSPA SWARA.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

2. Jurnal

- Aditya, P., Syaharuddin, S., Rochgiyanti, R., Mardiani, F., & Prawitasari, M. (2022). Jejak Kebangkitan Pers Kota Banjarmasin Pasca 1998. *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*,53.
- Agustina, A. S. (2015). Pemilihan Umum, Media Massa, dan Wanita: Pandangan Majalah TEMPO dan GATRA terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden di Indonesia pada Tahun 1999 dan 2004. *SUSURGALUR*, 71-74.
- Anggraeni, Puspita Dewi, Henry Susanto, and Rinaldo Adi Pratama. (2022). "Revolusi Indonesia Dalam Perspektif Pro Dan Kontra Pers Nasional Periode Pasca Proklamasi Hingga Tercapainya Pengakuan Kedaulatan." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 11.1, 35-58.
- Arinanto, S. (1991). Pemberedelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36-37.
- Arismunandar, S. (2006). *AJI Bukan "Barisan Sakit Hati"*. Jakarta: *Jurnal Academia.edu*. 254.
- Budiman, A. (1994). *Ketakutan Pers, Ketakutan Kita. dalam A. J. Independen, Bredel 1994. Jurnal Hukum*, 23-25.
- Bhakti, I. N. (2004). *The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems*. The Asia-Pacific: a region in transition, 195-206.
- Chan, V. S. (2022). Perbandingan Pembredelan Majalah Tempo Pada Tahun 1982 Dan 1994. 208-212.
- Darna. (2018). Memilih Metode Penelitian Yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 288.
- Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunikasi:Jurnal Ilmu Komunikasi*, 53-55.
- Hadi, G. K. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 40-45.
- Harahap. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 6.

- Imron, S. Y. (2016). *Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia*. *Jurnal CANDI*, 145.147.
- Kakiailatu, T. (2007). Media in Indonesia: Forum for political change and critical assessment. *Asia Pacific Viewpoint*, 48(1), 60-61.
- Legowo, S. H. (2013). Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996. *Publika Budaya*, 16-17.
- Murtiningsih, J. S. (1999). Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru). *Jurnal Filsafat*, 57-65.
- Padiatra, A. M. (2020). Pers Pasca Orde Baru: Sebuah Tinjauan Sejarah Kontemporer. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 46.
- Restendy, M. S. (2020). Dinamika Produksi Media Cetak Dan Tantangan industri Pers di Indonesia. *Al-Ittishol Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 147.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal ilmu budaya*, 11(2), 71-74.
- Safitri. (2018). Dampak Pendirian Agentschap Van De Javasche Bank Te Djokdjakarta Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Yogyakarta Tahun 1880-1940. *Jurnal Ilmu Sejarah*, 477..
- Saptohadi, S. (2011). Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 127-128.
- Sundoro, P. (2018). Studi Kritis Historis Komunikasi Menteri Penerangan dengan Pers di Era Orde Baru. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 53.
- Suparni, E. (2020). Strategi Pemasaran Majalah Tempo pada PT Tempo Inti Media Tbk. *E-Journal Widya Ekonomika*, 62-63.

Sutrisono, P. S. (2011). Fenomena Kebangkitan Industri Pers di Daerah/ Media Lokal. Dalam B. Nugroho, *Profesionalisme, Sejarah, dan Masa Depan Pers Daerah* (hal. 86-87). Jakarta: Jurnal Dewan Pers.

Soegijono, M.S (1993). Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. Jakarta. Vol.3 nomor 1, 1993. Diambil dari: <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/930/1586> (08 April 2022).

Yudhapramesti. (2015). Jurnalis dan Jurnalisme dalam Fenomena Kontemporer. *Jurnal Komunikasi*, 45.

Zulianto, A. (2016). Perkembangan Persurat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005. *Journal of Indonesian History*, 5-9.

3. Skripsi

Haritajaya, O. B. (2017). *Pemberedelan Pers Masa Orde Baru (1966-1998)*. UIN Jakarta.

Kartiko, Y. P. (2014). *Analisis Semiotik Korupsi Terhadap Sampul Majalah Tempo Pada Kasus Simulator SIM*. 50-65.

4. Website, Majalah, Dokumen, dan Wawancara

Andriana, M. D. (2009, February 7). *Menikmati Dasa Warsa Kebebasan Pers di Indonesia*. Dipetik August 7, 2022, dari Antaranews: <https://www.antaranews.com/berita/132232/menikmati-dasa-warsa-kebebasan-pers-di-indonesia>

Daniel. (2014, June 22). *Kisah "Tempo" yang Diberedel Soeharto, dan Diultimatum Hashim*. Dipetik May 15, 2022, dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/danielht/54f6e924a333113b528b4ba4/kisah-tempo-yang-diberedel-soeharto-dan-diultimatum-hashim>

Independen, AJI (2019). <https://aji.or.id/>. Dipetik August 2021, dari <https://aji.or.id/>

Kompas, K. (1994, June 22). Pemerintah Batalkan SIUPP "Tempo", "Editor", dan "Detik".

Majalah Tempo. (1994, June 11). *Habibie dan Kapal Itu*, hal. 26.

Majalah Tempo. (1994, June 4). *Mencoba Menggoyang Habibie*, hal. 88.

Subrata, D. (1994). *Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Majalah Tempo (Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.123/KEP/MENPEN/1994. tgl 21 Juni 1994*. Jakarta: Menteri Penerangan.

Wawancara dengan Bapak Andreas Harsono pada 4 April 2022.

Wawancara dengan Ibu Lenah Susianty 11 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Goenawan Mohamad 12 Mei 2022.

Wawancara dengan Bapak Wina Armada Sukardi 27 Februari 2023.